

SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1999

TENTANG

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1987, tentang Usaha Losmen dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, maka mengenai usaha hotel dengan Tanda Bunga Melati perlu diatur kembali.
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang usaha hotel dengan tanda bunga melati di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepala Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km. 292/Hk.205/Phb-79 dan Nomor 208 tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepala Daerah Tingkat I ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km. 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;

9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km. 70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen Pada Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 69/PW,304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun ~~1986~~ tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Bupati / Walikota Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- g. Hotel dengan Tanda Bunga Melati selanjutnya disebut hotel, adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan ;
- h. Pemimpin Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan hotel ;
- i. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar ;
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dina Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Usaha Hotel Perorangan untuk dapat membangun hotel ;

- k. Izin usaha adalah izin untuk menjalankan usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati ;
- l. Izin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan hotel ;
- m. Pembangunan hotel adalah kegiatan membangun baru, menambah kamar / memperluas, memperbaiki dan merubah bentuk bangunan hotel ;
- n. Tim penilai adalah tim yang beranggotakan instansi terkait ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud untuk tujuan Peraturan Daerah tentang Usaha Hotel adalah untuk :
 - a. Memberikan dasar hukum terhadap pemberian izin pembangunan baru, perbaikan, perluasan bangunan dan izin usaha hotel.
 - b. Meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku atas perusahaan hotel.
 - c. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada tamu hotel.
 - d. Memudahkan pembinaan dan pengawasan atas perusahaan hotel.
- (2). Tidak termasuk dalam pengertian hotel dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. Hotel Bintang, Penginapan Remaja (Youth Hotel), Pondok Wisata dan Perkemahan.
 - b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemandokan Mahasiswa dan Pelajar.

- c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya.

BAB III PENGUSAHAAN

Pasal 3

Pengusahaan hotel adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pemimpin Hotel dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. Memberi perlindungan kepada tamu hotel.
- b. Mencegah penggunaan hotel dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau melanggar kesusilaan.
- c. Mentaati ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.
- e. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam hotel dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

- g. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1). Usaha hotel dapat berbentuk Badan Usaha dan Usaha Perorangan.
- (2). Modal usaha hotel dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1). Setiap pembangunan hotel dan pengusaha hotel baru atau penambahan kamar harus memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Persetujuan prinsip dan izin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapinya dengan Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4). Tatacara memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1). Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana pembangunan hotel tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.
- (2). Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1). Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Memperolehnya secara tidak sah.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - c. Melakukan perubahan atau penyimpangan sebagaimana tersebut dalam Izin Usaha.
 - d. Perusahaan jatuh pailit.
 - e. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pencabutan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PENGGOLONGAN HOTEL

Pasal 9

- (1). Hotel digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 3 (tiga).

- b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 2 (dua).
 - c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati, selanjutnya disebut Hotel Melati 1 (satu).
- (2). Penggolongan kelas hotel didasarkan pada persyaratan kriteria seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (3). Penggolongan hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata.
 - (4). Piagam golongan hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Tim Penilai.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Dengan tidak mengurangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata, pembinaan dan pengawasan hotel dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Pemimpin Hotel wajib memberikan laporan statistik penghunian kamar secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (3). Dalam hal dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan perkembangan hotel kepada Pemimpin Hotel.
- (4). Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hotel dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5). Terhadap golongan kelas hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 peraturan daerah ini, dilakukan penelitian dan penilaian secara berkala oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 11

- (1). Gubernur Kepala Daerah dapat dinaikkan atau menurunkan kelas hotel apabila kondisi hotel yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi.
- (2). Perubahan golongan kelas hotel dimaksud ayat (1) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik hotel yang diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hotel melati 3 (tiga) yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan hotel, harus diubah menjadi hotel berbintang.

Pasal 13

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai hotel harus menggunakan nama hotel.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2). Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(3). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Memasuki rumah tersangka ;
- c. Penyitaan benda ;

- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Surat izin usaha hotel yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur usaha hotel yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Cap / Ttd

H. ENDANG KOSASIH

WARBITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah :
Nomor : 26 tahun 2000
Tanggal : 10 April 2000

PLT. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Drs. MATLIM ALANG
Pembina Utama Madya
NIP. 530 002 402

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Usaha Losmen dicabut dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hotel dengan tanda bunga melati, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tentang usaha hotel dengan tanda bunga melati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

- Huruf a : Dengan perlindungan dimaksud bahwa Pemimpin Hotel menjaga dan memelihara agar tamu-tamu terhindar dari gangguan fisik dan non fisik seperti kebakaran, pencurian, kebisingan, fasilitas sanitasi dan bentuk gangguan lain.

- Huruf b : Pimpinan Hotel diwajibkan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta menjaga keamanan misalnya dengan membentuk satuan keamanan (satpam) hotel. Pimpinan Hotel diwajibkan juga mengadakan pembukuan hotel walaupun dalam bentuk sederhana.
 Untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu hotel, pimpinan hotel memberikan gaji / upah yang layak kepada para pekerja hotel dengan memperhatikan kemampuan hotel.
 Pimpinan harus memperhatikan peraturan / ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
 Tarif / sewa kamar ditentukan bersama antara Pemerintah Daerah di tempat bersama dengan Persatuan Pemilik Hotel dan memasang / menempatkan tarif / sewa tersebut di masing-masing kamar dan ruang tamu.
 Untuk mengetahui identitas tamu-tamu hotel, setiap tamu diharuskan memperlihatkan Kartu Tana Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan lainnya dari Pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada petugas / pemilik hotel.
- Huruf c s.d g : Cukup jelas
- Pasal 5 :
- Ayat (1) : Badan usaha berupa Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi dan Yayasan yang didirikan dengan Akte Notaris.

- Ayat (2) : Modal usaha dapat berbentuk tanah, tempat didirikan hotel, bangunan dan halaman, perlengkapan dan peralatan lainnya.
- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Dalam hal dipandang perlu, Kepala Dinas Pariwisata dapat melakukan peninjauan atau penelitian ke lokasi sebelum persetujuan prinsip dan izin usaha diterbitkan.
 - Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Jangka waktu pembangunan Hotel selama 1 (satu) tahun dan apabila selama itu pembangunannya belum selesai, maka pembangunan tersebut batal dengan sendirinya kecuali ada permohonan dengan alasan-alasan yang cukup kuat, sehingga persetujuan prinsip dan ijin usaha baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pasal 9 : Golongan kelas hotel dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangannya.
- Pasal 10 : Berhasil tidaknya usaha Hotel sangat tergantung kepada pembinaan dan pengawasannya, oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa mengurangi kewenangan Direktur Jenderal Pariwisata untuk melakukan pembinaan umum

terhadap usaha hotel. Agar semua hotel benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan relevan berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

Pasal 11 s.d 19

: Cukup jelas

LAMPIRAN I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 6 TAHUN 1999
 TANGGAL : 8 MARET 1999

PERSYARATAN HOTEL MELATI III (TIGA)

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | M | P | D |
| I | FISIK | a. Lokasi hotel mudah dicapai umum / pribadi roda empat langsung ke arah area hotel | | 2 | |
| 1 | Lokasi dan lingkungan | b. Hotel harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat | | 3 3 3 3 3 | |
| 2 | Tanaman | Hotel memiliki tanaman : 1) Terletak di dalam atau di luar bangunan 2) Tanaman terpelihara, bersih dan rapi | | | 3 3 |
| 3 | Tempat parkir | a) Tersedia tempat parkir kendaraan tamu hotel b) Tidak becek / tersedia saluran air | | 3 3 | |
| 4 | Bangunan | Bangunan hotel memenuhi persyaratan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya). b. Pengaturan ruang hotel ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang / produk hotel | | | 3 3 3 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | <p>c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :</p> <p>1) Ruang lobby</p> <p>2) Kamar tidur</p> <p>3) Tampak muka hotel</p> | | 4 | |
| | | d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan hotel | | | |
| | | e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari : | | | |
| | | 1) Utilitas | | | |
| | | a. Air | | | |
| | | Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES) No. 1 Tahun 1975 mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air | 1 | | |
| | | b. Listrik | | | |
| | | - Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah (PUTL 1977) | 1 | | |
| | | - Tersedia pembangkit listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% kapasitas PLN | | 5 | |
| | | c. Tata udara | | | |
| | | Tata udara diatur dengan atau tanpa pengaturan suhu | | 1 | |
| | | 2) Komunikasi | | | |
| | | a. Tersedia telepon 1 (satu) iuran yang dapat digunakan untuk lokal dan interlokal untuk hotel dan lokasinya tidak terjangkau oleh saluran telepon (perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (contohnya CB dan sebagainya) sesuai peraturan yang berlaku. | 1 | | |
| | | b. Tersedia saluran telepon dalam (aiphon/intercome) | | | 5 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|--|-------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| 5 | Kamar Tamu | 3). Pencegahan bahaya kebakaran : Tersedia alat pencegah kebakaran yang serba guna | 1 | | |
| | | 4). Pembuangan limbah : | | | |
| | | a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ke tempat pembuangan | 1 | | |
| | | b. Tersedia saluran pembuangan air / kotoran air buangan yang memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku | 1 | | |
| | | a. Jumlah kamar minimal : | | | |
| | | - Kamar standar 15 buah | 1 | | |
| | | - 17% dari kamar tamu dilengkapi kamar mandi di dalam, sisanya setiap 4 kamar dilengkapi dengan 1 kamar mandi di luar | 1 | | |
| | | b. Luas minimal : | | | |
| | | - Kamar standar 20 m ² | | | 5 |
| | | Kamar mandi di dalam 14 m ² tanpa kamar mandi di dalam | | | |
| | | c. Tinggi kamar minimal 2,6 m | | | 4 |
| | | d. Penerangan 4 watt per m ² | | | 4 |
| | | e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus dari sinar luar | | | 4 |
| | | f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu | 1 | | |
| g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air : | | | 4 | | |
| 1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan 1 orang atau untuk 2 orang sesuai dengan ukuran kamar standar | | | 4 | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | - Ukuran tempat tidur untuk 1 orang 190 x 100 cm | | | 4 |
| | | - ukuran tempat tidur untuk 2 orang 190 x 160 cm | | | 4 |
| | | - Perlengkapan setiap tempat tidur : | | | |
| | | a. Kasur | 1 | | |
| | | b. Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra 1 buah | 1 | | |
| | | c. Sprei 1 helai | 1 | | |
| | | d. Selimut 1 buah per bed | 1 | | |
| | | e. Hotel dianjurkan menyediakan bantal dan guling cadangan | | | 3 |
| | | Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik | | | |
| | | 2). Almari pakaian dengan gantungan baju 8 buah | | 5 | |
| | | 3). Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu | | | 4 |
| | | 4). Meja rias dengan kaca rias dan kursinya | | 4 | |
| | | 5). Meja dengan 2 buah kursi | | | 4 |
| | | 6). Rak koper | | 3 | |
| | | 7). Keranjang sampah | 1 | | |
| | | 8). Tempat air minum dan 2 buah gelas | | 4 | |
| | | 9). Daftar cucian / laundry | | | 2 |
| | | 10). Lilin dan tempatnya | | 2 | |
| | | 11). Rak handuk | | 2 | |
| | | 12). Asbak 2 buah | 1 | | |
| | | 13). Saluran telepon untuk | | | 2 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | keperluan intern (aiphone) | | | |
| | | h. Perlengkapan kamar mandi : | | | |
| | | 1. Bak mandi dan gayung | 1 | | |
| | | 2. WC untuk yang diluar terpisah | 1 | | |
| | | 3. Gantungan handuk | | | 3 |
| 6 | Lobby | a. Hotel harus mempunyai lobby | 1 | | |
| | | b. Tersedia : | | | |
| | | 1. Kursi sofa dengan mejanya | | | 3 |
| | | 2. Peta kota dan propinsi setempat | | | 3 |
| | | c. Tata udara diatur dengan atau alat pengatur suhu | 1 | | |
| 7 | Telepon umum | Hotel menyediakan telepon di lobby | | | 2 |
| 8 | Toilet umum | Hotel menyediakan toilet umum di lobby terpisah untuk pria dan wanita | | 5 | |
| 9 | Ruang yang disewakan | Tersedia drugstore | | | 1 |
| 10 | Front office | Front office tersedia : | | | |
| | | 1. Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan / informasi | 1 | | |
| | | 2. Tempat kasir | 1 | | |
| | | 3. Room rack (rak posisi kamar) | | 3 | |
| | | 4. Tempat penitipan barang berharga | | 3 | |
| | | 5. P3K | 1 | | |
| 11 | Kantor pengelola hotel | Tersedia Kantor Pimpinan dan Administrasi dengan catatan-catatan sebagai berikut : | | | 5 |
| | | - Daftar tarif | | | 2 |
| | | - Buku agenda pesanan | | | 1 |
| | | - Formulir pendaftaran tamu | | | 2 |
| | | - Buku tamu | | | 1 |
| | | - Laporan tata graha | | | 1 |
| | | - Catatan lena | | | 1 |
| | | - Catatan cucian | | | 1 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-----------------------------|--|-------------|---|--------|
| | | | M | P | D |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Buku kas - Buku pengeluaran uang tunai - Catatan utang piutang - Laporan rugi / laba - Neraca perusahaan | | 1 | |
| 12 | Ruang lena | Tersedia tempat penyimpanan lena | 1 | | |
| 13 | Ruang binatu | a. Tersedia ruang binatu untuk cucian dan setrika | | 2 | |
| | | b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian | | 2 | |
| 14 | Areal dan Ruang Operasional | | | | |
| a | Gudang | Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan hotel | | 4 | |
| b | Fasilitas | Fasilitas karyawan terdiri dari : 1. Kamar mandi dan WC karyawan 2. Ruang makan karyawan 3. Ruang untuk ibadah | 4 | | 3 4 |
| II | OPERASIONAL / MANAGEMENT | | | | |
| 1 | Organisasi | a. Hotel harus memiliki struktur organisasi yang jelas | | 5 | |
| | | b. Tersedia uraian tugas tertulis untuk setiap tingkat jabatan | | | 5 |
| | | c. Tersedia petunjuk pelaksanaan operasional (manual) tertulis | | | 5 |
| 2 | Tenaga Kerja | Persyaratan pendidikan dan pengalaman : a. Pimpinan Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 4 tahun | | 6 | |
| | | b. Kepala bagian Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tata laksana operasional bidang | | 6 | |
| | | | | 5 | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|
| | | | M | P | D |
| | | tata graha / kantor dengan pengalaman kerja 3 tahun | | 5 | |
| | | c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu - Mampu berkomunikasi dengan bahasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris | | | 8 |
| | | d. Kesehatan karyawan : Dalam 1 tahun diadakan pemeriksaan berkala satu kali | 1 | | |
| 3 | Front Office | Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1. Penerangan / titip pesan, surat dan penjualan benda-benda pos 2. Penitipan barang-barang berharga 3. Penitipan koper 4. Pemesanan kamar hotel 5. Penanganan keluhan tamu 6. Telepon / telegram 7. Pembayaran rekening hotel | | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| 4 | House Keeping (Tata Graha) | a. Kamar tamu Tersedia pelayanan : 1. Air panas 2. Pengganti lena minimal 1 kali sehari 3. Pencatatan kerusakan fisik dan perlengkapan / peralatan kamar serta dekorasi b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih | | 6 6 | 5 |
| 5 | Binatu | Hotel menyediakan pelayanan cuci dan setrika | | 6 | |
| 6 | Ruang Karyawan | a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi sanitasi b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi / WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai | | 6 6 | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|---------------|-------------------------------|--|-------------|------------|-----------|
| | | | M | P | D |
| 7 | Keamanan | Petugas keamanan untuk area seluruh hotel bertugas selama 24 jam - Tersedia regu pemadam kebakaran | | 1 | |
| 8 | Kebersihan dan Kesehatan | Diadakan penyemprotan insektisida berkala untuk seluruh ruangan hotel | | 6 | |
| 9 | Pelayanan Makanan dan Minuman | Tersedia makanan dan minuman | | 6 | |
| JUMLAH | | | 28 | 265 | 64 |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap / Ttd

H. ENDANG KOSASIH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah :

Nomor : 26 tahun 2000

Tanggal : 10 April 2000

PLT. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Drs. MATLIM ALANG
Pembina Utama Madya
NIP. 530 002 402

KETERANGAN:

M = Mutlak

P = Perlu

D = Disarankan

LAMPIRAN I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
 TENGAH
 NOMOR : 6 TAHUN 1999
 TANGGAL : 8 MARET 1999

PERSYARATAN HOTEL MELATI II (DUA)

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|---|-------------|---|--------|
| | | | M | P | D |
| I | FISIK | | | | |
| 1 | Lokasi dan lingkungan | a. Lokasi hotel mudah dicapai umum / pribadi roda empat langsung ke arah area hotel b. Hotel harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat | | 3 | |
| 2 | Tanaman | Hotel memiliki tanaman : 1) Terletak di dalam atau di luar bangunan 2) Tanaman terpelihara, bersih dan rapi | | | 3 2 |
| 3 | Tempat parkir | a) Tersedia tempat parkir kendaraan tamu hotel b) Tidak becek / tersedia saluran air | | | 3 2 |
| 4 | Bangunan | Bangunan hotel memenuhi persyaratan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya. b. Pengaturan ruang hotel ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang / produk hotel | | 3 | 2 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | <p>c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :</p> <p>1) Ruang lobby</p> <p>2) Kamar tidur</p> <p>3) Tampak muka hotel</p> | | 2 | |
| | | <p>d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan hotel</p> | | 3 | |
| | | <p>e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :</p> <p>1) Utilitas</p> <p>a. Air</p> <p>Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES) No. 1 Tahun 1975 mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air</p> <p>b. Listrik</p> <p>- Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah (PUTI. 1977)</p> <p>- Tersedia pembangkit listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% kapasitas PLN</p> <p>c. Tata udara</p> <p>Tata udara diatur dengan atau tanpa pengaturan suhu</p> <p>2) Komunikasi</p> <p>Tersedia telepon 1 (satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal dan interlokal</p> | 1 | | |
| | | | 1 | | |
| | | | | | 2 |
| | | | 1 | | |
| | | | | | 5 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|---|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| 5 | Kamar Tamu | 3). Pencegahan bahaya kebakaran : Tersedia alat pencegah kebakaran yang serba guna | 1 | 5 | |
| | | 4). Pembuangan limbah : | | | |
| | | a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ke tempat pembuangan | 1 | | |
| | | b. Tersedia saluran pembuangan air / kotoran air buangan yang memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku | | | |
| | | a. Jumlah kamar minimal : Kamar standar 10 buah | 1 | | |
| | | b. Luas minimal : Kamar standar 16 m ² Kamar mandi di dalam 14 m ² tanpa kamar mandi di dalam | | 4 | |
| | | c. Tinggi kamar minimal 2,6 m | | 4 | |
| | | d. Menerangan 4 watt per m ² | | 5 | |
| | | e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus dari sinar luar | | | 3 |
| | | f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu | 1 | | |
| g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air : | | | 3 | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | h. Perlengkapan kamar tidur : | | | |
| | | 1. Ukuran tempat tidur untuk 1 orang atau untuk 2 orang sesuai dengan ukuran kamar standar | | 4 | |
| | | - ukuran tempat tidur untuk 1 orang 190 x 100 cm | | 2 | |
| | | - Ukuran tempat tidur untuk 2 orang 190 x 160 cm | | 2 | |
| | | - Perlengkapan setiap tempat tidur : | | | |
| | | a. Kasur | 1 | | |
| | | b. Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra 1 buah | 1 | | |
| | | c. Sprei 1 helai | | | |
| | | d. Selimut 1 buah per bed | | | |
| | | Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik | | | |
| | | 2). Almari pakaian dengan gantungan baju 8 buah | | 5 | |
| | | 3). Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu 30 lux | | | 2 |
| | | 4). Meja rias dengan kaca rias dan kursinya | | | 2 |
| | | 5). Meja dengan 2 buah kursi | | | 2 |
| | | 6). Keranjang sampah | 1 | | |
| | | 7). Tempat air minum dan 2 buah gelas | | | 2 |
| | | 8). Lilin dengan tempatnya | | 4 | |
| | | 9). Rak handuk | | 5 | |
| | | 10). Asbak 2 buah | 1 | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|----------------------------|--|---|---|-------------|
| | | | M | P | D |
| 6 | Lobby | i. Perlengkapan kamar mandi : 1. Bak mandi dan gayung 2. WC untuk yang diluar terpisah 3. Gantungan handuk | 1 1 | 5 | |
| | | a. Hotel harus mempunyai lobby | | 5 | |
| | | b. Tersedia : 1. Kursi sofa dengan mejanya 2. Peta kota dan propinsi setempat | | | 2 2 |
| 7 | Toilet umum | c. Tata udara diatur dengan atau alat pengatur suhu Hotel menyediakan toilet umum di lobby terpisah untuk pria dan wanita | 1 | | 3 |
| 8 | Front office | Front office tersedia : 1. Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan / informasi 2. Room rack 3. P3K | 1 1 1 | | |
| 9 | Kantor pengelola hotel | Tersedia ruang administrasi | | 4 | |
| 10 | Ruang Binatu | a. Tersedia ruang binatu untuk cucian dan setrika | | | 2 |
| | | b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian | | 3 | |
| 11 | Area dan Ruang Operasional | a. Gudang | | | 3 |
| | | b. Fasilitas | Fasilitas karyawan terdiri dari : 1. Kamar mandi dan WC karyawan 2. Ruang makan karyawan 3. Ruang untuk ibadah | | 3 3 3 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-----------------------------|--|-------------|------------------|---|
| | | | M | P | D |
| II | OPERASIONAL / MANAGEMENT | | | | |
| 1 | Organisasi | a. Hotel harus memiliki struktur organisasi yang jelas b. Tersedia uraian tugas tertulis untuk setiap tingkat jabatan | | 6 | 5 |
| 2 | Tenaga Kerja | Persyaratan pendidikan dan pengalaman : a. Pimpinan Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 tahun b. Kepala bagian Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tata laksana operasional bidang tata graha / kantor dengan pengalaman kerja 2 tahun | | 6 | |
| | | | | 4 | |
| | | | | 4 | |
| 3 | Front Office | Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1. Penerangan 2. Penitipan barang-barang berharga 3. Telepon 4. Pembayaran rekening hotel | | 6 7 7 7 | |
| 4 | House Keeping (Tata Graha) | a. Kamar tamu Tersedia pelayanan : 1. Air panas 2. Pengganti lena minimal 1 kali sehari b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih | | | 5 |
| | | | 5 | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|--------|-------------------------------|---|-------------|-----|----|
| | | | M | P | D |
| 5 | Binatu | Hotel menyediakan pelayanan cuci dan setrika | | | 5 |
| 6 | Ruangan Karyawan | a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi sanitasi | | 3 | |
| | | b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi / WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai | | 3 | |
| 7 | Keamanan | Petugas keamanan untuk area seluruh hotel bertugas selama 24 jam - Tersedia regu pemadam kebakaran | 1 | | |
| | | | | 3 | |
| 8 | Kebersihan dan Kesehatan | Diadakan penyemprotan insektisida berkala untuk seluruh areal hotel | | | 5 |
| 9 | Pelayanan Makanan dan Minuman | Tersedia pelayanan makanan dan minuman | | | 5 |
| JUMLAH | | | 23 | 148 | 79 |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

KETUA,

Cap / Ttd

H. ENDANG KOSASIH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah :

Nomor : 26 tahun 2000

Tanggal : 10 April 2000

PLT. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Drs. MATLIM ALANG
Pembina Utama Madya
NIP. 530 002 402

KETERANGAN:

M = Mutlak
P = Perlu
D = Disarankan

LAMPIRAN I. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
 TENGAH
 NOMOR : 6 TAHUN 1999
 TANGGAL : 8 MARET 1999

PERSYARATAN HOTEL MELATI I (SATU)

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|---|-------------|---|--------|
| | | | M | P | D |
| I | FISIK | | | | |
| 1 | Lokasi dan lingkungan | a. Lokasi hotel mudah dicapai umum / pribadi roda empat langsung ke arah area hotel b. Hotel harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat | | 7 | 2 |
| 2 | Tanaman | Hotel memiliki tanaman : 1) Terletak di dalam atau di luar bangunan 2) Tanaman terpelihara, bersih dan rapi | | | 1 1 |
| 3 | Tempat parkir | a) Tersedia tempat parkir kendaraan tamu hotel b) Tidak becek / tersedia saluran air | | | 1 |
| 4 | Bangunan | Bangunan hotel memenuhi persyaratan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya. b. Pengaturan ruang hotel ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang / produk hotel | | 3 | 2 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| | | <p>c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :</p> <p>1) Ruang lobby</p> <p>2) Kamar tidur</p> <p>3) Tampak muka hotel</p> | | | 2 |
| | | <p>d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan hotel</p> | | 2 | |
| | | <p>e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :</p> <p>1) Utilitas</p> <p>a. Air</p> <p>Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES) No. 1 Tahun 1975 mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air</p> <p>b. Listrik</p> <p>- Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan pemerintah (PUTL 1977)</p> <p>- Tersedia pembangkit listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% kapasitas PLN</p> <p>c. Tata udara</p> <p>Tata udara diatur dengan atau tanpa pengaturan suhu</p> | 1 | | |
| | | <p>2) Komunikasi</p> <p>Tersedia telepon 1 (satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal dan interlokal</p> | | | 3 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|---|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| 5 | Kamar Tamu | 3). Pencegahan bahaya kebakaran : Tersedia alat pencegah kebakaran yang serba guna | 1 | | |
| | | 4). Pembuangan limbah : | | | |
| | | a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ke tempat pembuangan | 1 | | |
| | | b. Tersedia saluran pembuangan air / kotoran air buangan yang memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku | | 3 | |
| | | a. Jumlah kamar minimal : Kamar standar 10 buah | | | |
| | | b. Luas minimal : Kamar standar 16 m ² Kamar mandi di dalam 14 m ² tanpa kamar mandi di dalam | | 3 | |
| | | c. Tinggi kamar minimal 2,6 m | | 2 | |
| | | d. Menerangan 4 watt per m ² | | 3 | |
| | | e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus dari sinar luar | | | 2 |
| | | f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu | 1 | | |
| g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air : | | 2 | | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|---|-------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | M | P | D |
| 6 | Lobby | h. Perlengkapan kamar tidur : | | | |
| | | 1. Ukuran tempat tidur untuk 1 orang atau untuk 2 orang sesuai dengan ukuran kamar standar | | | |
| | | - ukuran tempat tidur untuk 1 orang 190 x 100 cm | | | |
| | | - Ukuran tempat tidur untuk 2 orang 190 x 160 cm | | | |
| | | - Perlengkapan setiap tempat tidur : | | | |
| | | a. Kasur | 1 | | |
| | | b. Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan ekstra 1 buah | 1 | | |
| | | c. Sprei 1 helai | 1 | | |
| | | d. Selimut 1 buah per bed | 1 | | |
| | | Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik | | | |
| | | 2). Almari pakaian dengan gantungan baju 8 buah | | | 2 |
| | | 3). Keranjang sampah | | 3 | |
| | | 4). Lilin dengan tempatnya | 1 | | |
| | | 5). Rak handuk | 1 | | |
| | | 6). Asbak 2 buah | 1 | | |
| i. Perlengkapan kamar mandi : | | | | | |
| 1. Bak mandi dan gayung | 1 | | | | |
| 2. WC untuk yang diluar terpisah | 1 | | | | |
| 3. Gantungan handuk | | 4 | | | |
| a. Hotel harus mempunyai lobby | | 2 | | | |
| b. Tersedia : | | | | | |
| 1. Kursi sofa dengan mejanya | | 2 | | | |
| 2. Peta kota dan propinsi setempat | | | | | |
| c. Tata udara diatur dengan atau alat pengatur suhu | 1 | | | | |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|----|-----------------------------|--|-------------|---|-------------|
| | | | M | P | D |
| 7 | Front office | Front office tersedia : 1. Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan / informasi 2. Room rack 3. P3K | 1 1 1 | | |
| 8 | Kantor pengelola hotel | Tersedia ruang administrasi | | 3 | |
| 9 | Ruang Binatu | Tersedia ruang binatu untuk cucian dan setrika | | 2 | |
| 10 | Gudang | Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan hotel | | | |
| II | OPERASIONAL / MANAGEMENT | | | | |
| 1 | Organisasi | Hotel harus memiliki struktur organisasi yang jelas | | | |
| 2 | Tenaga Kerja | Persyaratan pendidikan dan pengalaman : a. Pimpinan Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 tahun b. Kesehatan karyawan : Dalam 1 tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal 1 kali | | 4 | |
| 3 | Front Office | Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1. Penerangan 2. Penitipan barang-barang berharga 3. Telepon 4. Pembayaran rekening hotel | | 5 | 7 5 4 |

| No | Unsur-unsur Persyaratan | Uraian Persyaratan | Bobot/Nilai | | |
|--------|-------------------------------|---|-------------|----|----|
| | | | M | P | D |
| 4 | House Keeping (Tata Guna) | a. Kamar tamu Tersedia pelayanan : - Penggantian lena minimal 1 kali sehari b. Area publik Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih | | 5 | |
| 5 | Ruangan Karyawan | a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi / WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai | | 3 | |
| 6 | Keamanan | Petugas keamanan untuk area seluruh hotel bertugas selama 24 jam | 1 | | |
| 7 | Kebersihan dan Kesehatan | Diadakan penyemprotan insektisida berkala untuk seluruh areal hotel | | 4 | |
| 8 | Pelayanan Makanan dan Minuman | Tersedia pelayanan makanan dan minuman | | 4 | |
| JUMLAH | | | 20 | 94 | 36 |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap / Ttd

H. ENDANG KOSASIH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap /Ttd

WARBITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah :

Nomor : 26 tahun 2000

Tanggal : 10 April 2000

PLT. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Drs. MATLIM ALANG
Pembina Utama Madya
NIP. 530 002 402

KETERANGAN :

M = Mutlak

P = Perlu

D = Disarankan